

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA OTONOMI KHUSUS (DOK) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG**

**Ali Taufan Arifin<sup>1\*</sup>, Otniel Safkaur<sup>2</sup>, Bill J.C Pangayow<sup>3</sup>, Theo Allo Layuk<sup>4</sup>**

*<sup>1\*234</sup> Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih*

*\*Corresponding Author*

### **Abstract**

*Financial Performance is the level of achievement of results in the field of regional finance, which includes regional revenues and expenditures. This study takes the variables of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Special Autonomy Fund (DOK) as they are indicators of regional revenue used to measure a region's financial independence. The research was conducted to determine whether PAD, DAU, DAK, and DOK have an effect on the financial performance of the Sorong Regency Government during the period 2016–2023. The research method used is an explanatory survey, which aims to test hypotheses and generally explains phenomena in the form of relationships between variables. This study uses quantitative data and secondary data obtained from the financial reports of the Sorong Regency Government, employing a purposive sampling method. The analysis used includes descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, t-test, F-test, and the coefficient of determination test using SPSS version 26 software. The results of the study show that PAD has no effect on financial performance, DAU has no effect on financial performance, DAK also has no effect on financial performance, and the Special Autonomy Fund has no effect on the financial performance of the Sorong Regency Government.*

**Keywords:** *Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Special Autonomy Fund, Financial Performance*

### **Abstrak**

Kinerja Keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Dalam penelitian ini mengambil variabel PAD, DAU, DAK dan DOK karena merupakan indikator pendapatan daerah untuk mengukur kemandirian suatu daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah PAD, DAU, DAK dan DOK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong tahun 2016-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey*, yaitu metode yang bertujuan menguji hipotesis, yang umumnya menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi menggunakan software SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, DAK juga tidak berpengaruh terhadap kinerja Keuangan dan Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sorong.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Kinerja Keuangan

### **Pendahuluan**

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 (beserta perubahannya) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola pembangunan secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator keberhasilan, sehingga diperlukan laporan keuangan yang andal dan transparan.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan khusus bagi Papua, Dana Otonomi Khusus (DOK). PAD merupakan indikator utama kemandirian keuangan daerah, namun Kabupaten Sorong masih menghadapi keterbatasan dalam optimalisasi PAD karena infrastruktur dan basis ekonomi yang terbatas. DAU relatif stabil namun ketergantungan yang tinggi dapat menghambat inovasi pendapatan daerah. DAK ditujukan untuk kegiatan spesifik, namun efektivitasnya kerap terkendala keterbatasan teknis. Sementara itu, DOK memiliki kontribusi besar, meski pengelolaannya sering menghadapi persoalan transparansi dan akuntabilitas.

Data periode 2016–2023 menunjukkan fluktuasi pada keempat komponen pendapatan. PAD meningkat signifikan pada 2023 (Rp149,22 miliar) setelah penurunan pada 2018. DAU cenderung stabil di kisaran Rp500 miliar, meski turun tajam pada 2021 akibat dampak pandemi. DAK berfluktuasi dengan peningkatan signifikan pada 2023 sebesar 36,5%. DOK menunjukkan tren kenaikan tajam pada 2022–2023 hingga mencapai Rp537,57 miliar. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pengelolaan PAD, DAU, DAK, dan DOK secara optimal untuk memperkuat kinerja keuangan daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil beragam. Julitawati (2012) menemukan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, meskipun Dana Perimbangan berpotensi menurunkan kinerja. Rukmana (2013) menegaskan pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan secara simultan. Florida (2007) dan Batubara (2009) menyatakan hanya pajak daerah, retribusi, dan lain-lain PAD yang berpengaruh, sedangkan laba BUMD tidak signifikan. Wenny (2012) menambahkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan di Sumatera Selatan. Sementara itu, Pradana & Handayani (2023) menemukan PAD berpengaruh positif, DAK tidak berpengaruh, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan fenomena empiris tersebut, penelitian ini menambahkan variabel Dana Otonomi Khusus (DOK) untuk melihat sejauh mana pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DOK terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong periode 2016–2023.

---

## **Kajian Pustaka**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan agensi terjadi ketika pemilik (principal) mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer (agent). Prinsipal dan agen memiliki akses informasi yang berbeda, sehingga menimbulkan potensi asimetri informasi (Dewata et al., 2021). Dalam konteks pemerintahan, masyarakat melalui DPRD bertindak sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah sebagai agent (Febriyanti, 2023). Mekanisme umpan balik masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan menyeimbangkan hubungan tersebut.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, laba BUMD, dan lain-lain penerimaan sah (Bastian, 2002; Halim, 2007). PAD dimaksudkan untuk memberikan kewenangan keuangan kepada daerah dalam mendanai otonomi (UU No. 33/2004). Semakin besar PAD, semakin besar pula kemampuan daerah membiayai pembangunan. Komponen PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah/pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (UU No. 33/2004).

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU adalah dana APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (UU No. 33/2004). DAU minimal 26% dari penerimaan dalam negeri, dengan proporsi 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota (Halim, 2007). Mekanisme ini menutup kesenjangan fiskal antar daerah.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

DAK merupakan dana APBN yang diberikan untuk kegiatan khusus sesuai prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (UU No. 33/2004; PP No. 55/2005). DAK ditetapkan berdasarkan kriteria umum (kemampuan keuangan), khusus (karakteristik daerah), dan teknis (aturan kementerian). Dana ini digunakan untuk sarana prasarana fisik di daerah terpencil, pesisir, atau terdampak kerusakan lingkungan.

### **Dana Otonomi Khusus (DOK)**

Dana Otsus diberikan kepada Provinsi Aceh dan Papua untuk mendukung otonomi khusus (UU No. 21/2001; UU No. 35/2008). Tujuannya mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Dana Otsus Papua setara 2% dari DAU nasional, dialokasikan untuk pendidikan (30%), kesehatan (15%), ekonomi kerakyatan (20%), dan infrastruktur (20%).

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan menggali dan mengelola sumber keuangan untuk pembangunan dan pelayanan publik (Syamsi, 1986; Suprasto, 2003). Pengukuran dilakukan melalui rasio keuangan daerah terhadap APBD (Halim, 2007). Menurut Mahmudi

(2011), rasio digunakan untuk menilai kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, kontribusi pendapatan, serta pertumbuhan keuangan daerah.

### Jenis Rasio

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung menggunakan persamaan berikut ini (Mahmudi, 2011) :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli}} \times 100 \%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar total PAD terhadap total pendapatan daerah, maka rasio kemandirian keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya.

#### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan (Halim 2007). Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

#### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur

dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mahmudi, 2002). Penghitungan rasio efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100 \%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

#### Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio aktivitas (Keserasian Belanja Daerah) adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas terdiri atas : a) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD, b) Rasio belanja rutin terhadap APBD. Kedua rasio di atas sebagai berikut :

#### Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

Rasio belanja rutin terhadap APBD adalah rasio keuangan daerah yang merupakan hasil nisbah (perbandingan) antara total belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap total APBD yang diterima. Artinya, rasio ini menggambarkan seberapa besar belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 1 tahun periode anggaran. Kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Halim (2007), Rasio belanja rutin dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Rasio APBD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar rasio belanja rutin terhadap total APBD, maka Pemerintah Daerah tergolong aktif melakukan belanja rutin dalam 1 tahun periode anggaran atau sebaliknya. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

### Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

Rasio belanja pembangunan terhadap APBD adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan belanja untuk pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana yang diterima dari APBD. Rasio belanja pembangunan terhadap PAD dihitung dengan persamaan :

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Rasio APBD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dinyatakan bahwa semakin besar rasio belanja pembangunan terhadap total APBD, maka Pemerintah Daerah tergolong aktif melakukan belanja pembangunan dalam 1 tahun periode anggaran atau sebaliknya. Semakin tinggi tingkat belanja pembangunan terhadap APBD mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dana yang besar dari APBD dalam melakukan belanja modal, baik berupa barang maupun jasa untuk kepentingan jalannya pemerintahan atau sebaliknya.

### **Penelitian Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis**

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan daerah. Menurut Halim (2004), PAD adalah penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli. UU RI No. 33 Tahun 2004 juga mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Otonomi daerah menuntut kemandirian keuangan sehingga PAD berperan penting dalam kinerja keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Ginting et al. (2023) menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Sumatera Utara. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Novita & Arza (2024) serta Sari & Halmawati (2021) yang juga menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian lain oleh Nurvaliza & Putra (2024) mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar PAD yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangan yang dapat dicapai.

#### **Hipotesis:**

H1: PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

#### Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (UU No. 33/2004). DAU termasuk dana perimbangan yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan APBD (Sidik, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Halmawati (2021) membuktikan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Sumatera Barat, dan temuan serupa

juga dilaporkan oleh Ginting et al. (2023) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Sumatera Utara. Namun demikian, tingginya DAU justru dapat menurunkan kinerja keuangan daerah karena transfer dari pusat sering disertai syarat tertentu sehingga mengurangi otonomi, serta dapat menimbulkan ketergantungan sehingga melemahkan inisiatif daerah dalam menggali PAD. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kinerja keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh DAU.

**Hipotesis:**

H2: DAU berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus, terutama pembangunan sarana dan prasarana publik sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33/2004). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa DAK berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah. Julitawati (2012) menemukan bahwa DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan Rukmana (2013) juga memperoleh hasil serupa pada pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai DAK yang diterima serta dikelola dengan baik, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, apabila pengelolaannya mengalami kebocoran anggaran, maka kinerja keuangan daerah akan menurun.

**Hipotesis:**

H3: DAK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan

Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus di daerah tertentu. Otsus Papua mulai diberlakukan sejak UU No. 21 Tahun 2001, dan untuk Papua Barat melalui UU No. 35 Tahun 2008. Pemberian dana Otsus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah lain di Indonesia, serta memperkuat posisi masyarakat Papua sebagai subjek pembangunan. Dana Otsus ditetapkan sebesar 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dengan prioritas pembiayaan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Realisasi dana mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun, yang kemudian dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan proporsi 70% untuk Provinsi Papua dan 30% untuk Provinsi Papua Barat, serta pada tingkat kabupaten/kota sebesar 90% dan 10% untuk provinsi. Dengan demikian, pengelolaan Dana Otsus menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah, khususnya dalam penyediaan layanan publik dan pemerataan pembangunan.

**Hipotesis:**

H4: Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong.

---

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang menekankan analisis data numerik yang diolah dengan metode statistik tertentu. Desain penelitian menganalisis hubungan antara variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (DOK), dengan variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Data yang digunakan berupa data sekunder, bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sorong periode 2016–2023. Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat yang berjumlah 14, namun dengan teknik purposive sampling, Kabupaten Sorong dipilih sebagai sampel karena dianggap paling relevan.

Variabel yang digunakan meliputi PAD, DAU, DAK, DOK, dan kinerja keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, dengan formula:

$$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.$$

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari APBN dengan sifat block grant, yang besarnya didasarkan pada persentase 26% dari pendapatan dalam negeri netto dalam APBN dan ditujukan untuk pemerataan kemampuan pendanaan antar daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN dengan sifat terikat, digunakan untuk mendanai kegiatan khusus fisik maupun non-fisik sesuai prioritas nasional, dengan kriteria umum, khusus, dan teknis. Dana Otonomi Khusus (DOK) merupakan dana APBN yang dialokasikan ke daerah otonomi khusus, termasuk Papua, sebesar 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 25 tahun, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Indikator yang digunakan antara lain jumlah DOK yang diterima, persentasenya terhadap APBD, serta dampaknya terhadap pembangunan seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Kinerja keuangan daerah diukur melalui rasio kemandirian, yaitu kemampuan daerah membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan sumber keuangan sendiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Rasio kemandirian semakin tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal semakin rendah.

Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan software SPSS 26. Analisis mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta regresi linier berganda. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (dengan grafik Normal P-Plot dan uji Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (dengan Tolerance dan VIF, di mana  $TOL < 0,10$  atau  $VIF > 10$  menunjukkan adanya multikolinearitas), uji autokorelasi (dengan Durbin Watson, di mana nilai antara -2 hingga 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi), dan uji heteroskedastisitas (dengan scatterplot dan uji Park, di mana signifikansi  $> 0,05$  menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas).

Model regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KKPD = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DOK + e$$

**Keterangan:**

KKPD : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Khusus

DAK : Dana Alokasi Khusus

DOK : Dana Otonomi Khusus

a : Konstanta

b : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e : kesalahan.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk menilai kelayakan model (signifikansi < 0,05 berarti model layak), uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk menilai kekuatan hubungan model, serta uji t untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (signifikansi < 0,05 berarti berpengaruh signifikan).

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, nilai maksimum, dan rata rata. Berikut tabel hasil statistik deskriptif dari variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus serta variabel dependen, yaitu Kinerja Keuangan.

**Tabel 1**  
**Descriptive Statistics**

|                    | N | Minimum | Maximum | Mean     | Std. Deviation |
|--------------------|---|---------|---------|----------|----------------|
| PAD                | 8 | 64.33   | 149.22  | 90.8000  | 25.86852       |
| DAU                | 8 | 230.87  | 546.41  | 473.9888 | 99.62694       |
| DAK                | 8 | 152.48  | 332.45  | 240.4788 | 51.93424       |
| DOK                | 8 | 185.05  | 570.09  | 368.0925 | 159.91658      |
| KINERJA KEU        | 8 | 6.00    | 13.00   | 7.2500   | 2.37547        |
| Valid N (listwise) | 8 |         |         |          |                |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2024)

Dalam tabel 4.8 dapat dilihat bahwa jumlah data dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 sampel (N). Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama periode 2016 – 2023, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X2), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) dan Dana Otonomi

Khusus (DOK) (X4). Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kinerja Keuangan (Y).

### Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Uji hipotesis ini terdiri dari uji parsial (t) dan uji simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi:

#### 1) Uji Parsial (t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berikut hasil pengujian koefisien secara parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Parsial (Uji T)**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |      |                         |       |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant) | -2.906                      | 3.357      |                           | -.866 | .450 |                         |       |
|                           | PAD        | .083                        | .034       | .901                      | 2.445 | .092 | .331                    | 3.022 |
|                           | DAU        | .003                        | .006       | .130                      | .528  | .634 | .740                    | 1.352 |
|                           | DAK        | .009                        | .012       | .188                      | .695  | .537 | .613                    | 1.632 |
|                           | DOK        | -.002                       | .005       | -.163                     | -.472 | .669 | .374                    | 2.673 |

a. Dependent Variable: KINERJA KEU

#### Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2024)

Berdasarkan pada tabel 4.14, hasil uji signifikansi parameter individual (uji t), yaitu sebagai berikut :

##### a. Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan

Dilihat dalam hasil tabel 4.14 terlihat bahwa PAD memiliki nilai Sig. 0,092 dan thitung sebesar 2.445. Karena signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,092 > 0,05$ ) dan nilai thitung  $>$  ttabel ( $2.445 < 2,776$ ), maka H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka **hipotesis pertama (H1) ditolak**.

##### b. Pengaruh DAU terhadap Kinerja Keuangan

Dilihat dalam tabel 4.14 terlihat bahwa DAU memiliki nilai Sig. 0,634 dan thitung sebesar 0,003. Karena signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,634 > 0,05$ ) dan nilai thitung  $<$  ttabel ( $0,526 < 2,776$ ) maka H2 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka **hipotesis kedua (H2) ditolak**.

##### c. Pengaruh DAK terhadap Kinerja Keuangan

Dilihat dalam tabel 4.14 terlihat bahwa DAK memiliki nilai Sig. 0,537 dan t hitung sebesar 0.009. Karena signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,537 > 0,05$ ) dan nilai thitung  $<$  ttabel

(0,695 < 2,776) maka H3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. **Maka hipotesis ketiga (H3) ditolak.**

#### d. Pengaruh DOK terhadap Kinerja Keuangan

Dilihat dalam tabel 4.14 terlihat bahwa DOK memiliki nilai Sig. 0,669 dan thitung sebesar -0,002. Karena signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 (0,669 > 0,05) dan nilai thitung < ttabel (-.472 < 2,776) maka H3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DOK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. **Maka hipotesis ketiga (H3) ditolak.**

### 2) Uji Simultan (uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independen) memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel terikat (dependen). Pada pengujian ini memiliki nilai signifikansi 0,05. Jika nilai Fhitung > Ftabel atau jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien secara simultan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

| ANOVA <sup>a</sup>                            |            |                |    |             |       |                   |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model                                         |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
| 1                                             | Regression | 34.181         | 4  | 8.545       | 4.820 | .114 <sup>b</sup> |
|                                               | Residual   | 5.319          | 3  | 1.773       |       |                   |
|                                               | Total      | 39.500         | 7  |             |       |                   |
| a. Dependent Variable: KINERJA KEU            |            |                |    |             |       |                   |
| b. Predictors: (Constant), DOK, DAK, DAU, PAD |            |                |    |             |       |                   |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 (2024)

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat kita lihat bahwa hasil perhitungan regresi dengan nilai Fhitung sebesar 4,820 dengan taraf signifikan sebesar 0,114, sedangkan nilai Ftabel adalah sebesar 6,591. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung < Ftabel (4,820 < 6,591) hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan yakni PAD, DAU, dan DAK Pemerintah Kabupaten Sorong secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### 3) Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen).

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| <b>Model Summary<sup>b</sup></b>              |                   |          |                 |                            |               |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------------------------|---------------|
| Model                                         | R                 | R Square | Adjusted Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                                             | .930 <sup>a</sup> | .865     | .686            | 1.33154                    | 1.685         |
| a. Predictors: (Constant), DOK, DAK, DAU, PAD |                   |          |                 |                            |               |
| b. Dependent Variable: KINERJA KEU            |                   |          |                 |                            |               |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2024)

Berdasarkan pada tabel 4.15 dapat kita lihat ringkasan model yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (*R*), koefisien determinasi (*R Square*) yang disesuaikan (*adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the Estimate*). Nilai koefisien determinasi (*R<sup>2</sup>*) adalah sebesar 0,865 atau 86,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari Kinerja Keuangan dapat dijelaskan oleh PAD, DAU, DAK dan DOK. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 13,5% (100%-86,5%) dipengaruhi variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## **Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian**

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai indikator utama kemandirian daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggali sumber penerimaan dari potensi lokal. Berdasarkan hasil analisis rasio kemampuan keuangan (Tabel 4.2), kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Sorong tahun 2016–2023 berada pada kisaran 4,44% hingga 7,60%, dengan rata-rata 5,85%. Angka ini menunjukkan bahwa PAD belum mampu menjadi pilar utama pembiayaan daerah karena kontribusinya masih di bawah 10%. Meskipun demikian, uji hipotesis parsial memberikan hasil bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai Sig. 0,092 dan *t* hitung 2,445. Artinya, peningkatan PAD berkontribusi pada meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, pengaruh tersebut masih relatif kecil karena realisasi PAD tidak signifikan dibandingkan dana transfer pusat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun PAD meningkat, kinerja keuangan daerah belum optimal. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sari & Halmawati (2021) yang menemukan bahwa PAD memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Prastiwi & Aji (2020) juga menyatakan tingginya PAD dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Sejalan dengan itu, Verawaty et al. (2020) menegaskan bahwa daerah dengan PAD besar cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya, dan menegaskan masih lemahnya basis penerimaan asli daerah di Kabupaten Sorong.

---

### Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bentuk transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Hasil analisis rasio menunjukkan rata-rata kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah sebesar 30,91% selama periode penelitian. Meskipun mengalami fluktuasi, kontribusi DAU cenderung menurun, bahkan sempat mencapai titik terendah 17,54% pada 2021.

Uji parsial menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan Sig. 0,634 dan t hitung 0,003. Kondisi ini dapat dijelaskan karena DAU sebagian besar digunakan untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai, tunjangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga tidak memberikan efek langsung terhadap peningkatan efisiensi maupun efektivitas kinerja keuangan.

Temuan ini konsisten dengan Harjito, Nugraha, & Yulianto (2020) yang menekankan bahwa DAU bukan hasil kreativitas fiskal daerah, sehingga tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Verawaty et al. (2020) juga menegaskan bahwa tingginya DAU justru memperlihatkan ketergantungan terhadap pusat. Demikian pula, Machmud & Radjak (2018) menemukan bahwa peningkatan DAU dapat menurunkan nilai efisiensi pengelolaan keuangan.

Dengan kata lain, meskipun DAU merupakan sumber penerimaan terbesar kedua setelah Dana Otonomi Khusus, ketergantungan pada dana ini justru mengindikasikan rendahnya kemandirian keuangan daerah.

### Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan

Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan dalam mendanai program prioritas nasional di daerah. Rata-rata kontribusi DAK terhadap pendapatan Kabupaten Sorong adalah 15,60% . Kontribusinya relatif stabil pada kisaran 13–17% sepanjang 2016–2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 (2020).

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan Sig. 0,537 dan t hitung 0,009. Hal ini terjadi karena DAK digunakan untuk pendanaan kegiatan khusus yang sifatnya terbatas, misalnya pembangunan jembatan, pengadaan alat kesehatan, program pengendalian penyakit, hingga bantuan operasional sekolah. Dengan demikian, meskipun nominalnya besar, DAK tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan secara umum.

Penemuan ini sesuai dengan penelitian Harjito, Nugraha, & Yulianto (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan DAK tidak diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan daerah. Jauhar (2016) juga menemukan hubungan negatif antara DAK dan kinerja keuangan, di mana DAK yang besar justru menurunkan efisiensi daerah. Verawaty et al. (2020) menguatkan pandangan bahwa semakin besar DAK yang diterima, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah, yang pada akhirnya melemahkan kinerja keuangan.

### Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap Kinerja Keuangan

Dana Otonomi Khusus (DOK) adalah instrumen fiskal dari pusat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Rata-rata kontribusi DOK terhadap pendapatan Kabupaten Sorong adalah 23,49%, dengan fluktuasi cukup tajam. Tahun

2022, kontribusi DOK mencapai puncak 36,33%, sedangkan tahun 2018 berada pada titik terendah 13,97%.

Namun, hasil uji parsial menunjukkan bahwa DOK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan Sig. 0,537 dan t hitung 0,009. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlahnya besar, alokasi DOK tidak otomatis memperbaiki indikator kinerja keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor: lemahnya perencanaan, alokasi yang tidak sesuai kebutuhan prioritas daerah, serta pengawasan yang kurang optimal.

Penelitian Fransina & Banurea (2020) juga menemukan bahwa Dana Otsus di Papua Barat sering tidak teralokasi optimal untuk mendukung kinerja keuangan. Rumbiak (2018) menambahkan bahwa dana Otsus cenderung diarahkan pada belanja konsumtif ketimbang pembangunan produktif, sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan sangat minimal. Dengan demikian, meskipun DOK menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar, efektivitasnya bergantung pada tata kelola yang baik. Tanpa perencanaan dan pengawasan yang tepat, DOK tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong pada tahun anggaran 2016–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pertama, PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten Sorong. Hal ini menunjukkan rendahnya kontribusi PAD dalam membiayai pembangunan dan pelayanan daerah. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah daerah belum mampu menggali potensi lokal secara optimal untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Kedua, DAU juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena DAU merupakan dana transfer dari pusat yang lebih banyak digunakan untuk menutupi defisit belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai, sehingga tidak mendorong peningkatan efisiensi kinerja keuangan.

Ketiga, DAK pun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Meskipun jumlahnya cukup besar, alokasi DAK terbatas hanya pada program-program prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur tertentu, kesehatan, dan pendidikan, yang dampaknya tidak langsung terlihat pada kinerja keuangan daerah.

Keempat, DOK juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Sorong. Walaupun porsi nya cukup besar dalam total pendapatan daerah, penggunaan dana Otsus sering tidak terarah secara optimal sehingga tidak mampu memperkuat indikator kinerja keuangan.

---

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Dari sisi praktis, pemerintah daerah perlu lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki sarana dan prasarana, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola keuangan dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, baik DAU maupun DAK, sehingga kemandirian pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Selanjutnya, pengalokasian DAU dan DAK sebaiknya lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dari sisi akademis, penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sampel ke wilayah lain, seperti Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat, untuk melihat perbandingan tingkat kemandirian fiskal antar daerah. Selain itu, penelitian dapat menggunakan variabel independen yang berbeda atau menambahkan variabel lain yang relevan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Terakhir, penggunaan rasio keuangan lain, seperti rasio efektivitas dan efisiensi, juga perlu dipertimbangkan agar hasil analisis lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Boky, N. A. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 2(3), 658–664. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.16>
- Febriyanti, E. M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 629–637. <https://doi.org/10.24269/asset.v4i2.4356>
- Ginting, J. A., Yulsiati, H., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 315–320.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 1 (2004).
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 430–443. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>
- Nurvaliza, S., & Putra, G. H. (2024). Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 739–747.
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIaku)*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Putri, A. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 2655–5689.

---

Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>